

Wacana Islam Politik dan Islam Humanis di Indonesia

Oleh Muslih Usa

Perkembangan Islam di jazirah Arab, baik periode awal maupun (apalagi) setelah Nabi, tidak terhindarkan dari lekatan kecenderungan pertumpahan darah dalam masa yang amat panjang. Disatu sisi, hal ini lahir karena adanya kecurigaan dan ketidaksukaan kaum *Quraisy* atas kehadiran Islam yang dilihatnya kontra dan akan mengubah tradisi yang telah lama mereka anut. Islam juga dilihat akan mengubah status quo mereka atas kekuasaan, sehingga setiap pemeluk Islam selalu ditekan, disertai tuntutan agar kembali pada kepercayaan asalnya.

Sikap-sikap yang demikian, bagaimanapun juga telah memaksa pemeluk Islam pada masa itu yang dari hari ke hari semakin bertambah, untuk menghindarkan diri, dan sekali waktu melawan setelah dirasa sangat tertekan, dengan kekuatan-kekuatan yang dapat dihindarkannya. Pada tahap ini, maka pertumpahan darah tidak dapat dihindarkan lagi.

Disisi lain, keberlangsungan situasi serupa (pertumpahan darah),

menjadi semakin tidak terhindarkan pada episode sejarah pasca nabi, karena faktor kekuasaan telah semakin mengukuhkan sikap-sikap "berseberangan" diantara umat Islam. Sikap-sikap yang demikian mulai tampak dalam periode *Khalifaur Rasyidin* dan semakin menonjol pada era *Khalifah-khalifah Bani Umayyah*. Bahkan, seperti yang diistilahkan A. Syafii Maarif, pada masa ini Islam justru berkembang dalam dosa sejarah, kecuali masa *Khalifah Umar bin Abdul Aziz* yang berkuasa hanya 2 tahun lamanya. Selain itu, kehidupan dunia Islam selalu dominan dengan "kekerasan" dalam wacana Islam politik, yang sedikit sekali menunjukkan wacana Islam humanis dalam muara intelektual dan kemanusiaan.

Di sini Islam tampak digunakan sebagai alat politik untuk tujuan tertentu, seperti penciptaan jalan menuju *kekuasaan*, dan dalam upaya memelihara dan mempertahankannya. Menurut catatan sejarah, *Khalifah-khalifah pasca Bani Umayyah*, seperti epi-

sode *Bani Abbasiyah* yang memerintah dunia Islam hampir dua setengah abad lamanya, dinilai telah lebih baik. Namun situasinya tidak melepaskan keadaan "berseberangan", yang juga "berbau darah", terutama dalam masalah yang berkaitan dengan mempertahankan status quo.

Dalam konteks tersebut, Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin* bagi bergeser menjadi simbol pemersatu yang lebih dekat kedudukannya dengan *Islam politik*. Kecuali saat menghadapi bangsa Arab periode awal, yang sarat dengan unsur keterpaksaan, dan masih dalam keharusan beladiri. Namun pada masa berikutnya atau masa pertumbuhan kejayaan, Islam cenderung dijadikan sebagai alat politik oleh banyak tokoh Islam sendiri untuk mewujudkan ambisi individu atau kelompoknya.

Islam di Indonesia

Jika melihat konsep Islam mengenai keharusan memperjuangkan kepentingannya memang dapat dibaca dengan jelas, bahwa Islam mengajarkan, sebagaimana juga pernah ditunjukkan para Nabi, agar umatnya bersedia *mati syahid* untuk membela agama. Tetapi yang berlangsung pada episode Khalifah-khalifah, atau pemerintahan Islam setelah Nabi (Muhammad Saw) bukan hanya itu, tapi Islam juga digunakan sebagai "alat" untuk memperoleh kekuasaan atau untuk saling menjatuhkan diantara sesama yang dikemas dalam format *syahid*.

Namun tentu saja dengan tidak mengingkari, bahwa Islam "non politik" juga berkali-kali dicoba bangkitkan, dengan lahirnya para ulama dan cendekiawan yang berusaha menetralsir keadaan. Walaupun mereka kemudian benar menjadi sumber wacana lahirnya Islam humanis, kebanyakan tokoh tersebut tetap saja tidak mampu berbuat banyak dalam "melawan" situasi pada masanya. Bahkan, beberapa diantaranya justru mendapat tekanan penguasa sampai akhir hayatnya. Ibnu Taimiyah misalnya, sampai menemui ajalnya dalam penjara.

Bagaimana dengan Islam yang masuk ke Indonesia ? Berbeda dengan perkembangan Islam di "tanah kelahirannya". Islam yang masuk dan berkembang di bumi Nusantara ini, lebih *berbaju kedamaian* dan perkembangannya juga cenderung menjauh dari kekerasan, termasuk dalam masalah-masalah kekuasaan. Pertanyaan kita selanjutnya adalah, mengapa bisa demikian ?

Kita tentu dapat menjawab pertanyaan ini menurut berbagai sudut pandang masing-masing. Tapi yang tampak sangat menonjol adalah karena perkembangan Islam disini "berkawin" dengan faktor kultural bangsa yang mendiami kawasan Asia Tenggara ini, khusus bangsa Melayu yang di dominasi Indonesia. Untuk melihat masalah tersebut, masyarakat Aceh tampaknya bisa menjadi wakil pertama, sesuai dengan penetapan bahwa wilayah ini menjadi

tempat *persinggahan* Islam pertama di Indonesia dan tempat berdirinya Kerajaan Islam tertua di Asia Tenggara.

Sekalipun ada yang berpendapat bahwa Islam yang masuk ke Indonesia adalah Islam yang telah "berkubang dengan dosa sejarah", perkembangannya di kawasan nusantara tidak "melanjutkan episode pertumpahan darah". Ke kawasan ini, Islam bahkan tidak perlu dimasukkan dengan "pedang", karena dapat diterima oleh masyarakat ini tanpa rasa curiga. Maulana Malik Ibrahim yang berperan dalam menyebarkan Islam di Jawa, sebagai pusat pemerintahan moderen nusantara masa itu misalnya, justru berhasil memanfaatkan kekuasaan para raja dan kaum bangsawan di wilayah ini.

Di sini kita melihat, bahwa keberadaan kultural bangsa ini, mudah melakukan kompromi terhadap sesuatu yang dilihatnya akan memberi situasi yang lebih baik. Ini sesuai dengan prinsip seperti masyarakat Aceh misalnya, sebagai *coastal society*, masyarakat pantai, yang memiliki prinsip terbuka, terutama karena pengalamannya dalam melakukan hubungan (perdagangan) dengan berbagai kalangan dan bangsa kaum pendatang.

Aspek kultural (keterbukaan) yang demikian, telah memberikan kemudahan lahirnya kondisi adaptif dengan sesuatu yang baru, yang dilihatnya mampu memberikan harapan baru pula. Karenanya, Islam yang

berkembang di Aceh dan seterusnya meluas ke seluruh nusantara, dapat dilihat telah mengalami proses "sterilisasi" secara kultural dari apa yang disebut dengan "berkubang dosa sejarah" dalam masa perkembangan sebelumnya di wilayah budaya masyarakat lain.

Dalam penegasan yang lebih konkret, bahwa perkembangan Islam di Aceh dan demikian juga di berbagai daerah lain di nusantara ini, tidak memerlukan kekerasan ("pedang") dan kehadirannya tidak pula memacu lahirnya kelas kekuasaan, sekalipun para raja dan keluarganya pada masa itu juga menyatakannya diri masuk Islam.

Realita tersebut tentu bukan semata-mata karena faktor budaya sebagai masyarakat terbuka, tetapi juga karena pendekatan dalam kedatangan Islam yang persuasif-kultural di tengah "kebingungan" masyarakat bangsa mengenai kepercayaan yang dapat menenangkan lahir dan batin. Inilah kemudian yang kita lihat dalam perkembangan Islam yang disebarluaskan para *wali*, dengan caranya yang senantiasa berpijak pada pendekatan yang menghormati unsur kemanusiaan dan sosial budaya masyarakat setempat.

Islam Politik

Melihat perkembangan Islam di bumi Indonesia pada masa lampau itu, tidak menampakkan bias kekerasan yang berarti sebagaimana yang terjadi di "tanah kelahirannya". Da-

lam perjalanan Kerajaan Islam *Pasai* sebagai cikal bakal kerajaan Islam Aceh, Islam justru berkembang menjadi payung pengaman, pemersatu masyarakat, dan inspirasi penuntun dalam pelaksanaan pemerintahan. Demikian juga perluasannya, seperti masuknya Islam ke lingkungan Kerajaan *Demak*, Kerajaan *Mataram*, Kesultanan *Cirebon*, dan lain-lain. Tetapi kenapa kemudian Islam di nusantara masuk dalam "kacah politik" ?

Kita bisa melihat kembali proses perkembangan Islam di Jazirah Arab dan Afrika. Karena perluasan "kampung-kampung" Islam di sana ditentang oleh kebanyakan pemimpin setempat, maka Islam dijadikan sebagai simbol pemersatu oleh para pemeluknya. Ajaran Islam mengenai berjuang untuk kebenaran dan berjuang di jalan Allah, *fii sabilil haq* dan *fii sabilillah* dalam konsep tauhid yang tinggi atau akan mendapat predikat mati *syahid* dan surga jaminannya, tidak bisa dipungkiri telah membangkitkan semangat yang besar kaum muslimin untuk membela agama, bangsa, dan negaranya.

Pengalaman ini akhirnya teradopsi pula oleh para pemimpin lokal dan nasional bangsa ini untuk memobilisasi massa dan dengan semangat yang tinggi untuk melawan penjajah. Ini terbukti dan berjalan dalam masa yang cukup panjang, sekurang-kurangnya sejak awal abad XVI sampai dengan perte-

ngahan abad XX. Yaitu pada saat bangsa Indonesia menjalani era masuknya penjajah *Portugis*, kemudian kolonial *Belanda* dan *Jepang*, di samping gejala-gejala perilaku kolonialis bangsa-bangsa lainnya.

Pada masa inilah Islam di nusantara ini "resmi" masuk dalam kacah politik, tetapi pada awalnya untuk memobilisir semangat berjuang masyarakat melawan penjajah. Format ini berbeda sekali dengan yang terjadi atau sebagai diperankan oleh kebanyakan para pemimpin Islam masa Khalifah-khalifah Islam. Gejala tersebut berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Di Aceh misalnya, semangat serupa efektif hingga tahun 1910, sebelum Aceh bisa ditundukkan kolonial Belanda dengan politik adu domba antara para ulama dengan kaum *Uleebalang*, yaitu kaum bangsawan di daerah tersebut.

Dalam wacana lain dan wilayah yang lebih kecil, tapi lebih tegas sebagai "Islam politik", dapat kita temukan pula pasca Indonesia merdeka. Lahirnya DI/TII *Karto Soewirijo* yang direspon oleh beberapa daerah atau kantong Islam di Indonesia misalnya, adalah juga contoh Islam politik di Indonesia. Di sini Islam dijadikan "alat pemersatu, pendorong" dan *referensi* ditetapkannya suatu "keputusan". Sekalipun tidak sampai melahirkan pertumpahan darah yang berarti, perilaku tersebut telah menjebak Islam dalam wacana politik yang cukup nyata.

Dalam konteks lain, cerminan serupa teramu dalam strategi yang dikembangkan partai politik masa Orde Lama dan awal Orde Baru, bahwa Islam masih diefektifkan sebagai "sejawat" dunia politik, dengan menawarkan kantong aspirasi eksklusif. Perbedaannya, masa penjajahan Islam dijadikan sebagai simbol atau alat pemersatu, pendorong untuk mengusir penjajah, maka pada "perjuangan" model Karto Soewirijo, atau yang menamakan dirinya "Aceh Merdeka" dan lain-lain, Islam ditempatkan sebagai alat untuk memobilisasi kekuatan *dissident*.

Sedangkan strategi parpol, Islam ditempatkan sebagai faktor mobilitas massa dan sebagai "penarik" untuk meraih suara atau memperkuat posisi partai dalam meraih kemenangan dalam Pemilu. Ini tentu karena dipahami, bahwa jumlah pemilih Indonesia terbesar adalah pemeluk Islam.

Catatan lain adalah usaha-usaha "resmi" dalam sidang *Konstituante* (1956-1959) yang ingin menjadikan Islam sebagai dasar negara. Sekalipun jumlah anggota sidang mayoritas beragama Islam, tapi gagasan memasukkan Islam secara resmi sebagai ideologi politik, tidak mendapat dukungan dalam kualifikasi respon yang mampu menjadikan Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Islam.

Namun begitu, sekalipun tidak ada yang meraih keberhasilan sempurna dalam "memperalat Islam" se-

jak kedatangannya di bumi nusantara dan dalam batas tertentu termasuk dalam wajah ketidaksukaan terhadap penjajah, semuanya telah menampilkan indikator bahwa Islam dibawa ke dalam kawasan politik. Sehingga, Islam yang masuk ke Indonesia yang sesungguhnya relatif telah lebih "steril" dari "ruh" politik, menjadi "berkubang" pula dengan dosa sejarah. Sekalipun diakui, bahwa ini dalam format yang tidak sama dan berbeda persoalannya dengan apa yang terjadi dalam perkembangan Islam di "tanah kelahiran" atau daerah lain di sekitarnya.

Atau, masuknya Islam dalam wilayah politik pada masa penjajahan, masih bisa dianggap menyandang nilai positif, karena tujuannya untuk membebaskan bangsa dari tekanan bangsa asing. Tapi untuk sikap-sikap *dissident* pasca Indonesia merdeka, seperti jenis gerakan *sempalan* yang memanfaatkan keperanan dan kemampuan Islam sebagai pemersatu, telah mencatatkan "dosa" Islam dalam perjalanan sejarahnya di nusantara ini, yang sedikit banyak juga diperankan dalam perjalanan partai politik masa Indonesia merdeka.

Wacana Islam Humanis

Perjalanan Islam dalam kawasan politik yang relatif lama di bumi Indonesia, akhirnya juga melahirkan "kelelahan". Terutama setelah kemudian disadari, bahwa Islam juga "diselewengkan" atau sering dijadikan sebagai alat oleh berbagai

kelompok *gerakan sempalan*. Diduga, hal ini pula yang mendorong lahirnya kesadaran berbagai kalangan, golongan, termasuk penguasa, untuk menyelamatkan "reputasi" yang kurang menguntungkan ini.

Langkah "pengamanan" yang kemudian dilahirkan, sebenarnya memang tampak lebih bermakna politis. Karena, juga dimaksudkan sebagai strategi untuk membersihkan kemungkinan lahir kembali berbagai gerakan atau isu yang memanfaatkan Islam sebagai "referensi pembangkit", yang diduga akan memberikan gangguan yang berarti bagi kelancaran pelaksanaan pembangunan nasional.

Disadari atau tidak, suka atau tidak suka, upaya yang demikian pada prinsipnya juga merupakan refleksi yang menunjang penguatan keberadaan Islam sebagai *rahmatan lil alamin*, yang mendambakan keharmonisan, ketenteraman, kedamaian, kerukunan, dan sebagainya. Konsep perang atau *jihad*, baru disahkan setelah adanya realita bahwa Islam dan umatnya tidak mendapat perlakuan yang wajar dari segala kekuatan lain yang mengitarinya. Tetapi, jika hal tersebut tidak terbukti dengan jelas, maka membangun kedamaian dalam format *ukhuwah Islamiyah*, *ukhuwah wathaniyah* dan *ukhuwah basyariyah*, adalah sisi yang harus senantiasa dikedepankan.

Untuk aspek-aspek dinamisasi kehidupan Islam dan umatnya, memang dapat kita lihat keberlang-

sungannya secara bersahaja dalam masa pemerintahan orde baru. Proses fusi partai yang berlabel Islam, meski sesungguhnya masih bisa diperdebatkan, dapat merupakan awal dimulainya "pemisahan" Islam dari kawasan politik praktis. Hal ini tuntas ketika lahirnya UU nomor 8 tentang Keormas pada tahun 1985, yang mengharuskan semua ormas dan orsospol mengganti azasnya yang berdasarkan agama dengan ideologi negara.

Pada perjalanan Indonesia pasca *Azas Tunggal*, sebagai isu kuat yang terangkat dalam UU nomor 8 tahun 1985, telah melahirkan langkah dinamis kehidupan umat Islam. Indikator tersebut tercermin dari semakin menjauhnya Islam dari kawasan politik dan mendekati kawasan yang mengedepankan kebebasan umatnya dari keterbelakangan, yaitu sebagai satu problema besar yang masih mengelilingi bangsa Indonesia.

Ini menjadi satu proses pengacaan diri, sejalan dengan gagasan kemanusiaan yang semakin menonjol untuk diutamakan. Maksudnya, proses "perlindungan" Islam dan umatnya, tidaklah cukup dengan pendekatan politis-normatif yang memperhitungkan kesulitan Islam di masa datang. Aspek yang tampak lebih penting adalah strategi-strategi yang menyentuh kebutuhan umat, dengan langsung melihat berbagai persoalan prinsipil yang sedang dihadapi masyarakat bangsa dalam menyongsong masa depannya.

Hal tersebut tampak lebih solid dalam apa yang telah diperbuat Muhammadiyah, NU, Persis, al-Khairat di wilayah timur Indonesia, dan beberapa lainnya. Secara umum organisasi keagamaan ini mengkhususkan gerakannya dalam bidang kemanusiaan, seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, dan di bidang dakwah yang membentengi umat dari kehancuran moral. Hal ini adalah langkah nyata dan strategis yang lebih mendinamiskan Islam dalam kehidupan umat.

Disini kita menemukan kebenaran dan kedinamisan strategi *high politics*, atau politik tingkat tinggi yang bertumpu pada moral dan amal shalih, dalam mengontrol jalannya negara nasional, yang mulai diaktifkan organisasi yang bercirikan Islam. Prinsip-prinsip yang lebih kurang sama, tampak juga diperankan oleh ICMI, kendatipun keberadaannya lebih mengakomodasikan diri pada negara, yang disertai dengan gerakan-gerakan sosial-kemanusiaan yang mulai meluas, terutama melalui badan usaha-badan usaha yang dimilikinya.

Dinamisasi yang menjadi proses tegasnya gerakan yang menguatkan basis kemanusiaan, bahkan juga dilakukan oleh masyarakat luas. Pada umumnya mereka bergerak dalam lingkaran penyadaran dan penyiapan (moral) umat untuk menghadapi zamannya, yang sama sekali berbeda dengan zaman para pendahulunya. Ini merupakan upaya

konkret ketimbang keberadaan kalangan yang lebih cenderung memfokuskan diri pada *post-post* elitis yang hanya menyita perhatiannya pada sisi vertikal semata, dan dapat dicurigai sebagai memperalat agama untuk kepentingan tertentu.

Keseluruhan gejala di atas yang mulai berlangsung setelah periode pertengahan *Orde Baru* sampai kurun waktu awal 90-an dan *Indonesia Emas* yang tampak mulai sangat dinamis ini, kiranya telah menjadi indikasi lanjut kesahajaan wacana kelahiran *Islam humanis*. Yaitu, Islam yang lebih mengutamakan identifikasi, perencanaan, pengerjaan, dan penyelesaian persoalan-persoalan kemanusiaan, baik moral maupun intelektual.

Dalam konteks tersebut dan dengan keadaan masyarakat Indonesia yang semakin terdidik ini, alasan-alasan apapun yang mendekatkan Islam dengan kancah politik, akan semakin sulit diterima khalayak. Ini sekaligus menjadi rambu-rambu bagi segenap kalangan dan termasuk orsospol, yang harus memulai pembiasaan, pemeliharaan, dan pembesaran dukungan massa dengan jalan yang profesional dan meninggalkan strategi yang bercorak mekanis yang mengandalkan aspek emosional dan sentimentil tertentu.

Dengan kata lain, pendekatan harus beralih pada corak organis sebagaimana yang tercipt dalam kehidupan masyarakat moderen, dengan bentuk ketergantungan fungsional

dan pembagian kerja yang jelas. Islam dalam negara nasional Indonesia akan beralih pada simbol kepentingan individu dan kepentingan universal manusia dengan prinsip *rahmatan lil 'alamin* dalam corak humanis dan lebih mementingkan ketenangan, keharmonisan, dan kesejahteraan umum.

Untuk satu kestabilan yang pasti, solid, maka proses dimanis ini memerlukan dukungan luas dan kesadaran pelaku sejarah, agar lebih ce-

pat dan mudah meraih hasil dan target yang perlu dicapai. Di samping sudah memberi kenyataan sulit "digiring" kembali ke wilayah politik, secara sengaja Islam memang perlu dipelihara agar tidak "ternoda" lagi oleh berbagai gejala "Islam politik", yang pernah menjebak umat Islam Indonesia khususnya, dan perkembangan Islam masa lampau di tanah dan sekitar tanah "kelahirannya", dalam "dosa" sejarah yang tidak terampuni.***